

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya yang pada kenyataannya selalu diatur oleh hukum. Hal ini berkaitan (sebagai konsekuensi yuridis) dengan pernyataan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparaturnya harus berdasarkan hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian sebagai negara hukum, Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu kepastian hukum, menjamin/melindungi hak asasi penduduk, dan peradilan bebas karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan/kompleks yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai yang diharapkan.¹

Proses perubahan dalam hukum progresif tidak lagi berpusat tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan

¹ Sudikno Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hal 1

untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.²

Hukum progresif mengajak bangsa bangsa ini untuk meninjau kembali (*review*) cara-cara ber hukum di masa lalu. Cara ber hukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan, hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai pada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), empati serta rasa perasaan (*compassion*).

Sejak Indonesia menjadi sebuah negara hukum, maka konstitusi dan perundang-undangan menjadi landasan untuk bertindak. Sekalipun demikian, kendati sama-sama mendasarkan pada hukum, belum tentu sekalian orang juga sama dalam memaknai hukum atau undang-undang itu. Perbedaan dalam memaknai hukum berlanjut pada cara menegakkan hukum.

Salah satu penegakan hukum yang sangat merisaukan gagasan hukum progresif adalah yang secara mutlak berpegangan pada kata-kata atau kalimat dalam text hukum. Cara yang demikian itu merupakan hal yang banyak dilazimkan dikalangan komunitas hukum, yaitu yang disebut sebagai menjaga kepastian hukum. Hukum adalah teks itu dan tetap seperti itu sebelum diubah

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: hukum yang membebaskan*, dalam jurnal hukum progresif, Vol. 1, Nomor 1, hlm 1-24

oleh legislatif. Cara berhukum tersebut hanya melihat sistem hukum sebagai mesin besar perundang-undangan yang harus dijalankan. Penegakkan hukum sudah menjadi maksimal, ibarat menjalankan teknologi “tekan tombol”. Para penegak hukum, seperti jaksa atau hakim, sudah menjadi sekrup-sekrup belaka dari mesin yang besar itu.³

Pembangunan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan kepada sumber tertib hukum negara yang berupa cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup, kesadaran yang luhur yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan peradilan adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak sedikit kasus yang tidak jelas kelanjutannya, mengambang atau diambangkan tentu akan menyulitkan mekanisme penilaian yuridis bilamana mengacu pada hukum yang ada. Yang pasti banyak pihak yang dirugikan oleh ketidakjelasan kelanjutan penyelesaian perkara, padahal jika dengan cara seksama dicermati dengan ketidakjelasan penanganan suatu perkara itu menghambat arus penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan itu sendiri. Manajemen operasional yang menyangkut misalnya sarana, prasarana dan sistem maupun manajemen kasus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewajiban dan kewenangannya, taat atas dalam melaksanakan jadwal sidang tidak akan mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara. Penanganan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri harus dilakukan dengan sederhananya prosedur tahapan perkara tersebut

³ Ibid

maka dapat menjamin efektifitas waktu penyelesaian perkara, sehingga dengan demikian memenuhi asas cepat.⁴

Dalam manajemen penanganan perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diperkuat dengan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 tanggal 21-10-1992 dan SEMA No. 3 Tahun 1998, yang menentukan pemeriksaan perkara perdata dan pidana harus selesai paling lama 6 bulan pada setiap tingkat pengadilan, bila perkara ternyata karena alasan waktu dan bobot perkara tidak selesai dalam 6 bulan harus ada laporan mengenai alasan-alasan yang kuat perkara tersebut belum selesai.⁵

Setiap insan manusia ingin mendapatkan atau memperoleh hak-haknya sebagaimana meliputi keadilan, tak jauh dari keadilan seharusnya juga adanya kepastian hukum.

Berdasarkan awal saya berada di Pengadilan Negeri Malang, dari hasil diskusi yang saya peroleh dengan salah satu hakim yang bernama Dr. Johanes Hehamony, SH. MH. saya mendapatkan materi pembahasan mengenai “*prejudichil gechsil*”, kemudian saya mulai konfirmasi ke panitera pengganti yaitu Bapak Dhany Eko Prasetyo, SE, SH, MM, M.Hum dimana dari panitera tersebut, saya mendapat informasi bahwa putusan *prejudichil gechsil* pernah

⁴ Bakhtiar Effendi. *Efektifitas Manajemen Penanganan Perkara Korupsi Kaitannya dengan Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*. Ta.umm.ac.id. diakses tgl 9/15/2017

⁵ Ibid

ada yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu. Maka dari bahan tersebut saya memandang bahwa kajian mengenai *prejudichil gechsil* dapat saya lakukan karena ada putusannya.

Setelah saya telaah putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl dianalisis oleh Hakim ada ketertarikan di amar putusannya mengenai penangguhan putusan pada perkara pidana tersebut.

Mengenai putusan "*prejudichil gechsil*" ini terdapat pada pasal 81 KUHP masih lanjutan dan satu kesatuan dengan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.⁶

Pada kasus perkara Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl dalam amar putusannya berbunyi :

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

⁶ John Thamrun. 2016. *Perselisihan Prayudisial*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 85-86

2. Menangguhkan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl atas nama Terdakwa NITA SAKIR Binti SAKIRMAN (Alm) tersebut diatas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bgl jo. Perkara Perdata Nomor 22/PDT/2014/PT.BGL jo. Nomor:1578K/PDT/2015 memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
4. Menetapkan bahwa selama Penangguhan Perkara ini, tempo daluarsa penuntutan tidak berjalan terus (berhenti);⁷

Dari putusan tersebut penulis tertarik mengakat masalah karena beberapa aspek antara lain:

Pertama, Template putusan tidak ada yang namanya putusan akhir yang menangguhkan perkara. Hakim tidak mungkin menunda perkara sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, karena itu akan menjadi tanggungan hakim itu sendiri. Lalu adanya putusan menangguhkan ini maka akan menjadi tanggung jawab siapa dikemudian hari nanti.

Kedua, Putusan ini sudah melanggar asas, karena putusan tidak boleh dipergantungkan terhadap putusan yang akan diputuskan kemudian (*yurisprudensi*). Melanggar juga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 335/Pid.B/2015/PN.Bgl. di akses 12 Maret 2017 pukul 21.00

Jika putusan seperti ini kepastian hukum menjadi tidak ada, karena menunggu sesuatu yang tidak pasti dan keadilan itu memberikan tepat pada waktunya.

Dari paparan masalah di atas maka penulis dalam tugas akhir hendak menganalisis kasus tersebut dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA NOMOR: 335/PID.B/2015/PN.BGL TENTANG *PREJUDICIEEL GESCHIL* DALAM KAITANNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl yang bersifat *Prejudicieel Geschil* terhadap kepastian hukum?
2. Apakah putusan yang bersifat *Prejudicieel Geschil* sudah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan agar suatu penelitian agar lebih terarah dalam menyajikan informasi sekaligus pengetahuan yang bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kedudukan putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl tentang *Prejudicieel Geschil* terhadap kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan *Prejudicieel Geschil*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan wacana pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkup peradilan umum terutama pada penerapan putusan *Prejudicieel Geschil* terhadap kepastian hukum.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan pihak lembaga peradilan terkait putusan Nomor: 335/Pid.B/2015/PN.Bgl yang menyebabkan melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan kepastian hukum menjadi tidak ada.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini, maka Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya :

1. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan beberapa pemahaman dan sumbangsih pemikiran mengenai tidak

adanya kepastian hukum dalam penerapan putusan Nomor: 335/Pid.B/2015/PN.Bgl.

b. Bagi Instansi Penegak Hukum

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan oleh instansi penegak hukum sebagai wacana untuk membenahi penegakan hukum yang tidak menyimpangi asas-asas peradilan.

c. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan *Prejudicieel Geschil* serta sebagai wacana pengetahuan terhadap masyarakat mengenai penerapan aspek kepastian dalam putusan hakim.

2. Kegunaan Teoritis

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan pandangan, manfaat serta sumbangsih yang benar-benar berguna bagi pihak akademisi, instansi penegak hukum, masyarakat maupun penulis terhadap rangkuman permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini.

G. Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang

akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut . Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya :

1. Penelitian Hukum Normatif (*normatif legal research*)

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan penulis maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan rumusan masalah dalam karya tulis ini maka metode pendekatan yuridis normatif ini akan dibahas oleh penulis berdasarkan bahan hukum kepustakaan.

b. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum pertama dan sangat penting yang digunakan oleh penulis. Penulis akan menggunakan Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl tentang *Prejudicieel Geschil* serta beberapa peraturan yang dimungkinkan penggunaannya dalam pembahasan.

2) Bahan hukum Sekunder, merupakan sumberdata yang memiliki posisi kedua, tepat setelah data primer. Sebagai data sekunder peneliti menggunakan beberapa sumber, diantaranya buku, jurnal, karya ilmiah maupun majalah serta surat kabar, artikel, putusan dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang dapat digunakan penulis sebagai bahan hukum penunjang untuk dijadikan sebagai penjelasan maupun petunjuk mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti ensiklopedi, kamus dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Studi Dokumen, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang putusan pengadilan, melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang berkaitan erat dengan putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl tentang *Prejudicieel Geschil*. Putusan tersebut didapatkan oleh penulis dari Website direktori putusan Mahkamah Agung pada kolom Pidana milik Pengadilan Negeri Bengkulu]

2) Studi Pustaka, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dari beberapa sumber data kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN.Bgl tentang *Prejudicieel Geschil*. Pada studi pustaka ini maka penulis

akan mengaitkan putusan tersebut dengan aspek kepastian dan keadilan hukum. Bukan hanya itu akan tetapi penulis juga akan menganalisis putusan tersebut apakah sesuai antara dakwaan dengan pasal yang digunakan hakim dalam putusan atau putusan tersebut telah sesuai dengan kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

d. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data adalah tahap yang paling penting dan menentukan karena dalam tahap ini terjadi proses pengolahan data, dalam sebuah penelitian hukum normatif pengelolaan data pada hakekatnya berarti kegiatan mengadakan sistematis bahan-bahan hukum tertulis

Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan teknis analisis isi (*content of analysis*) berdasarkan prinsip logis sistematis yang hasil penelitiannya akan di jelaskan dalam hubungannya dengan kerangka teoritik atau tinjauan pustaka.

H. Sitematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penelitian ilmiah, maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum .

Adapun sistematika penelitian hukum terbagi dalam 4 (empat) bab. Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menemukan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di gunakan, dan sintematika penulisan hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

a. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul . pada bab II memberikan penjelasan mengenai tinjauan hukum tentang permasalahan *Prejudicieel Geschil* terhadap kepastian hukum.

b. Kerangka Pemikiran

Berisi alur pemikiran yang hendak di tempuh oleh penulis yang di tuangkan dalam bentuk skema/bagan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap putusan *Prejudicieel Geschil* sesuai atau tidak dengan asas-asas yang diterapkan dalam hukum, terutama asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran yang penulis berikan.

